

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SUKOHARUM
KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sosial Islam (S, Sos)**

Dalam Ilmu Dakwah

Oleh

Nur Hamid

NPM: 1441020081

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS
AGAMA ISLAM NEGRI (UIN)**

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2021 M

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SUKOHARUM
KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S, Sos)**

Dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikas

Oleh

Nur Hamid

NPM: 1441020081

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Pembibing 1: Dr. Jasmadi, M.Ag

Pembibing II: Drs. Mansyur Hidayat, M.Sos.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS
AGAMA ISLAM NEGRI (UIN)**

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2021 M

ABSTRAK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA
SUKOHARUM KECAMATAN ADILUWIH
KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh :
Nur Hamid

Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu, pemberdayaan di mulai dari tahap bawah yaitu desa. Pemerintah saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah masuk dalam UU yang khusus mengatur pembangunan Desa. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu di mobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat di rasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Hadirnya BUMDes merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat. Sehubungan hal di atas, permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang di lalui dengan beberapa tahap yaitu Tahap penyadaran, Tahap pengembangan kapasitas /ketrampilan, Tahap penguatan modal usaha, tahap produksi, Fasilitasi pemasaran,

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata Penulis mengambil data sampel dengan menggunakan purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang penulis berikan maka sampel berjumlah 10 orang. Alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui di buka beberapa unit usaha yang jug merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dengan adanya upaya BUMDes dalam meberdayaakan masyarakat Sukoharum diharapkan mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes menjadi sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA
SUKOHARUM KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN
PRINGSEWU**

Nama: Nurhamid
NPM: 1441020081
Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Fakultas: Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Telah diperiksa dan dikoreksi oleh pembimbing I dan II maka untuk itu pembimbing I dan II menyetujui untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Maret 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jasmad, M.Ag
NIP: 196106181990031003

Drs. Mansyur Hidayat, M.Sos.I
NIP: 19650581719949031005

**Mengetahui
Ketua jurusan PMI**

Dr. M. Mawardi J, M.SI
NIP: 196612221995031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, UIN Raden Intan Lampung, Kode Pos 35131 Telp
(0721) 78088 / Fax 780422

PENGESAHAN

Sekripsi dengan judul: **“PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SUKOHARUM KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU”** disusun oleh: Nur Hamid, NPM : 1441020081, program studi: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, pada Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 :

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. M. Mawardi J, M.Si

Sekretaris : Fiqih Satria, M.T.I

Penguji Utama : Hj. Mardiyah, S.Pd., M.pd

Penguji Pendamping I : Dr. Jasmadi, M.Ag

Penguji Pendamping II : Drs. Mansyur Hidayat, M.Sos.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

NIP. 196104091990031002



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”(Qs. Ar-Raad:11)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah tercinta Fauzan dan Ibu tercinta Juminah yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa. Senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a restu keduanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah untuk kedua orang tua saya.
2. Istri tercinta Eni Nur'aini dan anak tersayang yang selalu memberi semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah ini.
3. Pengasuh pondok pestren Al Basyari abah yai Marjuni marzuqi dan pengasuh pondok pesatren Al Muttaqien abah yai Mustof Wagianto, yang selalu menjadi motifasi dalam hidup penulis.
4. Sahabat - sahabat penulis Alim sofian, M.alimron, M. Syafaat, M.Nasirun, Sapto Yulianto, Hardi. yang selalu memberikan motivasi dan semangat, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selamastudi.

RIWAYAT HIDUP

Nur Hamid dilahirkan di desa Sendang Mulyo kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 april 1994. Peneliti adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Terlahir dari pasangan yang harmonis dan selalu bahagia yaitu Bapak Fauzan dan Ibu Juminah.

Pendidikan dimulai dari SDN 04 Sendang Mulyo dan selesai pada tahun 2007. MTS Al Muallimin Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah selesai tahun 2012 Kemudian melanjutkan ke SMK AL-IMAN Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 TA. 2014/2015.



Bandar Lampung, 19 April 2021
Penulis

Nur Hamid
NPM. 1441020081

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bersyukur atas pertolongan dan karunianya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada aBaginda Nabi Muhammad SAW, kepadakeluarga, sahabatdan orang-orang yang senantiasa istiqomah memperjuangkan risalah yang dibawanya. Memohon kepada Allah ‘Azza Wajalla semogasyafa’atbeliau dapat diraih pada suatu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baadan Usaha Milik Desa (BUBDes) Sukohsrum di Pekon Sukoharum Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”**

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril dan materil serta membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.SI. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. M. Mawardi J.M.Si dan Bapak Hi. Zamhariri, S.Ag. M.Sos.I selaku Ketua Jurusan PMI dan Sekertaris Jurusan PMI.
3. Bapak Dr. Jasmadi, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Mansyur Hidayat, M.Sos.I selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasidan bimbingan dengan baik didalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Tim penguji munaqosah yang telah melaksnakan tugas ujian skripsi dengan baik sehingga penulis telah lulus dan dapat menyandang gelar S.Sos pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
5. Para dosen dan Civitas Akademik yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Pihak perpustakaan pusat dan juga perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku-buku referensi.
7. Masyarakat Pekon Sukoharum yang telah bersedia memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Istri, Ayah dan Ibu mertuaku yang telah mendoakan, serta memberikan dukungan baik secara material maupun spiritual.

Semoga atas bantuan dan bimbingan serta suport dari semua pihak menjadi bagian dari amal shaleh yang kelak akan tercatat disisi Allah ‘Azza Wajalla. *Aamiin Allahumma Aamiin*

Bandar Lampung, April 2021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PESEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Dan Kegunaan.....	10
F. Metode Penelitian	10
BAB II PROSES PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN BUMDES SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT	
A. Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
1. Proses pemberdayaan Masyarakat	21
2. Pengertian pemberdayaan Ekonomi	22
3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi	27
4. Setrategi dan Prinsip Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	28
B. Lembaga Ekonomi Masyarakat	
1. Pengertian Lembaga Ekonomi	30
2. Fungsi dan tujuan Lembaga ekonomi	32
3. Struktur Lembaga Ekonomi	33
C. Dasar Kebijakan Pemerintah Tentang Bubdes	
1. Kedudukan BUMDes	33
D. Fungsi dan Tujuan BUMDe	35
E. Pendirian Badan Uaha Miik Desa	36
F. BUMDes Sebagi Lembaga Pemberdaya	38

**BAB III PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARKAT
MELALUI BUMDES SUKOHARUM**

A. Profil Desa

- 1. Sejarah Desa 41
- 2. Geografi 42
- 3. Keadaan Sosial 43
- 4. Pembagian wilayah 45
- 5. Struktur organisasi..... 45

**B. Proses kegiatan BUMDes dalam meberdayakan
Ekonomi 47**

- a. Penyuluhan 47
- b. Pelatihan kewirausahaan 49
- c. Simpan Pinjam 51
- d. Industri Rumah Tangga..... 53
- e. Pengelolaan Pasar 58

**BAB IV PEMBERDAYAAN EKONOMI MELAUI BADAN
USAHA MILIK DESA**

**A. Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
BUMDes 61**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 68

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan arti yang terdapat dalam judul skripsi, yaitu : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes di Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”

Pemberdayaan adalah mengembangkan diri dari keadaan tidak berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas, berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.¹

Pemberdayaan adalah suatu aktifitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri (*self-determination*). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat –alat prosedur yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupan.²

Pengertian yang lebih luas, pemberdayaan memiliki pengertian terperolehnya kekuatan dan akses terhadap sumberdaya manusia agar mampu mencari nafkah. Selain itu juga memiliki pengertian mampu menjangkau sumber-sumber produktif guna meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.³

Dari pengertian di atas pemberdayaan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk

¹ Edi Soeharto, *Menejemen Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2005), Cet ke-1, h. 66.

² . Hikmah Harry, *Setrategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2006), h.10

³.Edi Soeharto, *Op.Cit*, h,5

mengembangkan segala potensi terkandung dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan tujuan untuk mendorong masyarakat untuk memiliki keterampilan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kemandirian.

Secara etimologi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani “oikonomia” yang terdiri dari kata “oikos” yang berarti rumah tangga dan “nomos” yang berarti aturan. Kata “oikonomia” mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.⁴ Henri Faisal juga mendefinisikan bahwa ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁵ Maka ekonomi dalam penelitian ini merupakan kegiatan peningkatan taraf hidup untuk mencapai kesejahteraan dan mencukupi kebutuhan hidup secara materi.

Masyarakat; Secara etimologi didefinisikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh sesuatu kebutuhan yang mereka anggap sama⁶. Sedangkan secara terminologi atau istilah masyarakat diartikan sebagai berikut:

- a. R. Lipton : setiap kelompok manusia yang telah lama cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya, berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dalam batas-batas tertentu.
- b. Selo Soemartjan : orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan budaya.
- c. Parsudi Suparlan : satu kehidupan sosial manusia yang menempati suatu wilayah tertentu.
- d. Gilin and Gilin : suatu kelompok manusia yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh persamaan agama.

⁴ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2009), h. 2

⁵ Henry Faisal, *Ekonomi Media*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), h. 2

⁶ .Ahmad Karim, *Sistem, Prinsip, dan tujuan, Ekonomi Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.10

Elly Irawan istilah masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat adalah kelompok orang-orang yang bertempat tinggal di suatu daerah geografis tertentu dimana satu sama lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup.⁷

Pengembangan ekonomi adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan mendayagunakan kemampuan life skill (keahlian hidup) yang dimiliki oleh masyarakat.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan pendapatan masyarakat kearah yang lebih maju dengan cara meningkatkan skill masarakat itu sendiri selama priode tertentu. Atau dengan arti lain pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan kondisi pendapatan masyarakat kearah yang lebih maju sesuai dengan kemampun dan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

Sedangkan BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekeayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁹

Jadi dari penegasan judul diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upaya pemberdayaan ekonomi melauai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu adalah usaha yang dilakukan oleh BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pengembangan skil/kemampuan yang dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan juga

⁷ Selo Soemarjan, *Pengantir sosiologi Umum*, (Jakarta; 2002), cet. Ke-IX, h.78

⁸ . Edi Sueharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat : Jurnal Comdev*, (Jakarta : BEMJ,PMI, 2004), h.3

⁹ . Admiko Koprasi. Net Oct 23, 2016, terdapat di [http://www.koprasi.net/2018/10/bumdes dan koprasi-desa.htm](http://www.koprasi.net/2018/10/bumdes-dan-koprasi-desa.htm), di akses pada tanggal 11 September 2019

keterampilan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan ekonomi.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Desa yang berfungsi memberdayakan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa. BUMDes merupakan upaya untuk meningkatkan kemadiriian masyarakat guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu, dalam mencapai sumberdaya manusia yang berkualitas perlu adanya peningkatan serta inovasi yang bisa meningkatkan kualitas SDM manusia, dan khususnya dapat hidup mandiri serta dapat berpotensi meningkatkan taraf hidup menjadi lebih bai lagi.
2. BUBDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes di Desa Sukoharum kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyrakat yang lebih baik, dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuan melalui mobilisasi sumber daya dan potensi desa lainnya.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya raya dan subur. Kekayaan alam dan laut melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat. Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Pembangunan nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Desa menurut Widjaya adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.¹⁰

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah dengan hasil yang relatif memuaskan sebagaimana diinginkan bersama, namun tingkat keberhasilannya belum secara optimal tercapai. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Menurut Sumpeno, strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan¹¹.

Beberapa strategi yang secara umum diimplementasikan dalam membangun kemandirian desa antara lain:

- (1) Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis,
- (2) Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
- (3) Membangun sistem perencanaan dan penyelenggaraan desa yang responsif dan partisipatif, dan
- (4) Membangun kelembagaan

¹⁰ . H. A.W. Widjaya, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3

¹¹ . Wahjudin Sumpeno, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (Aceh: The World Bank, 2011), h. 8

ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.¹² Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Padahal telah banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa program lainnya.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara dan bangsa Indonesia dari kemandirian desadesanya. Adapun untuk mewujudkan desa yang mandiri diperlukan adanya strategi pembangunan. Diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (Based on village). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) Pengembangan kelembagaan; (2) Pemberdayaan masyarakat; (3) Pengembangan ekonomi lokal, dan (4) Pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan

¹². Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 27

dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)¹³

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka BUMDes perlu didirikan. BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah Bottom-up planning) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.¹⁴

Salah satu desa yang telah mendirikan BUMDes adalah Desa Sukoharum yang berada di Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu. Keberhasilan pengelolaan BUMDes dalam pengelolaan potensi Desa menjadikan Desa Sukoharum sebagai desa teladan. keberhasilan yang dicapai BUMdes sukahrum selain dalam proses peningkatan kemandirian masyarakatnya adalah pendistribusian hasil keratifitas masarakatnya sehingga

¹³. Kementerian Negara, "Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal" terdapat di <http://www.kemeneqpd.go.id/> , diakses pada tanggal 12 oktobe 2019)

¹⁴. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), h 4.

masyarakat tidak lagi bingung dalam pemasaran hasil masyarakat ke konsumen. Adapun salah satu cara yang digunakan BUMDes sukoharum dalam meningkatkan pengenalan produk/hasil dari anggota bumdes pihak BUMDes mengadakan sebuah Pasar Tempel yang ada setiap hari rabu dan even yang di sebut pasar Pampringan sehingga banyak warga dari luar desa yang ikut memeriahkan acara tersebut. Selain itu Desa Sukoharum merupakan daerah transmigran yang mampu menjadi bagian penting dari usaha kolektif provinsi Lampung untuk meraih kemajuan. Dalam kasus ini, pendirian BUMDes Sukoharum termasuk ke dalam perencanaan pembangunan dari bawah (Bottom-Up Planning), hal ini karena BUMDes Sukoharum tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, melainkan berdasarkan atas inisiatif dari salah satu warga desa , ingin mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi warga desanya. Berdasarkan usulan warga tersebut kemudian perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat , dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian program desa tersebut. Dari musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dicanangkannya program BUMDes yang sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 78. Pemerintah desa kemudian mengadakan sosialisasi kepada warga desa tentang pendirian BUMDes. Sebagian besar warga merespon dengan antusias tentang pendirian BUMDes tersebut. Hal ini juga karena faktor kondisi perekonomian warga yang sebagian rendah, sehingga warga kemudian berinisiatif untuk mengembangkan usaha bersama melalui suatu lembaga desa guna mengatasi kesulitan yang dialami para warganya.¹⁵

BUMDes Sukoharum mulai di rencanakan pada ahir tahun 2015 kemudian mulai rsmi berdiri pada tanggal 6 mei 2016 pada awal berdirinya BUMDes ini belum memiliki usaha yang di bawah i tetapi seiring berjalanya waktu, pada awal tahun 2017 sudah mulai membuat usaha yang pertama kali dibetuk adalah pasar di mana pasar tersebut yang akan menjadi pondasi utama

¹⁵ Bpak Sanen, wawancara 12 oktober 2019

kelancaran masyarakat sukoharum khususnya dalam menjual dagangannya, setelah itu seiring berjalanya waktu barulah muncul usaha- usaha baru dengan usaha- usaha yang bergerak di dalamnya seperti , Produksi aneka kue dan pizza sinkong, produksi tahu. Adapun sumber modal awal BUMDes berasal dari anggaran dana desa dan kemudian ada penguatan modal yang sebagian berasal dari para anggota yang berhasil dalam mengelola usahanya. Salah satu program BUMDes Sukoharum dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu produksi tahu dan kue- kue moderen yang terbuat dari bahan tradisional, dan ada jugak acara bulanan yang paling terkenal yaitu Pasar pampringan yang di selegarakan oleh BUMdes untuk mengenal kan produk-produk atau olahan-olahan masyarakat, selain itu jugak pasar rutinan yang di adakan desa setiap hari rabu serta pengelolaan pedagang pasar sehingga dapat membaha kas BUMDes serta dapat menjadi perputaran ekonomi desa Sukoharum Menjadi lancar.

Poroduk- poroduk tersebut tidak akan mudah untuk di psaran tanpa melewati BUMdes, di sinilah peran betpa peting nya BUMDes karena bumdes meberi fasilitas atau pelyanan penjualan, dengandanya pasar-pasar tersebut dan dengan relasi orang luar yang mau menampung hsil-hasil kerajinan maupun makan yang di hasilkan para anggota BUMDes sehingga para anggota tidak kuatir lagi tentang penjualan poroduk-produk mereka, kemudian produksi tahu jugak menjadi salah satu produk unggulan bumdes karean menjadi atu-stunya pabrik di desa itu yang menjadikan terpenuhinya keprluan tahu di pasar desa. terlebih lagi sekarang BUMDes sukoharum telah memiliki wisata alam meskipun masih dalam tahap pengebangan. Sehingga olahan jajanan produk-produk desa bisa di pasarkan di situ sehingga banyak di kethui banyak orang.

Dari penjelasan beberapa anggota BUMDes yang aktif dalam keanggotaan, kemajuan ekonomi yang dirasakan cukup meningkat, dikarenakan mereka tidak perlu meminjam modal kepihak bank utuk bisa mendirikan usaha, selain itu mereka jugak diberikan pelatian dan penigkatan skilil usaha yang di tekuni .sehingga keberhasilan cukup tinngi yang mengakibatkan ekonomi mereka meningkat.

Berdasarkan keunikan diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi pembahasan skripsi penulis tentang proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes serta menggali seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Sukoharum kecamatan Adiluwih Pringsewu ?

E. Tujuan

Untuk mengetahui upaya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes di Desa Sukoharum kecamatan Adiluwih Pringsewu

F. Manfaat Penelitian

1. Pada tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal yang dimiliki desa . Serta dapat menjadi referensi dalam hal keilmuan pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat Desa Sukoharum agar lebih partisipatif dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid, maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang dipergunakan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial.¹⁶ Secara terminologis, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperandam dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membuat dekripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁹

Menurut Irawan Suehartono, penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.²⁰

Penelitian deskriptif ini ditunjang oleh teknik pengumpulan data antara lain survey literatur dan pengalaman. Survei literature

¹⁶. Noor Juliansyah dan Ahmadi, Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 34

¹⁷. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

¹⁸.Ibid. h. 241

¹⁹.Ibid. h. 3.

²⁰ . Irawan Suehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. 1, h. 35

dilakukan untuk memperoleh sumber data primer yakni dari buku teks dan data sekunder antara lain dari artikel jurnal, media cetak dan internet.

- c. Partisipan penelitian
 - 1) Partisipan

Partisipan atau subjek penelitian merupakan suatu yang sangat penting dan menentukan di dalam penelitian, oleh karena itu partisipan harus ditentukan terlebih dahulu di dalam penelitian sebelum peneliti mengumpulkan data.²¹“pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis sampel dan perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek penelitian”. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja. “Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Dalam sampling Purposif, peneliti secara sengaja memilih individu dan tempat untuk mempelajari atau memahami fenomena sentral. Standar yang digunakan dalam memilih partisipan dan tempat adalah apakah mereka kaya informasi.²²

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.²³

Secara teknis dalam penarikan sampel, teknik yang digunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin

²¹.Sukmadinata, Metode Penelitian, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 252

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods), (Bandung, Alfabeta CV, 2018), h. 95-96

²³ . Sedarmayanti, Hidayat Syarifudin, Op. Cit. h. 124

dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.²⁴

Penulis menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada, (1) partisipan yang memiliki informasi yang akurat dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini; (2) partisipan yang memiliki waktu yang cukup dalam memberikan informasi, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa digali lebih mendalam, (3) partisipan yang dapat mewakili dari sample penelitian. Sampel ditentukan oleh peneliti pada saat mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung

Penulis akan memilih sumber data berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Team pemberdaya dari pihak desa maupun dari luar yang melaksanakan program BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
2. Pengurus BUMDes yang mengerti dan faham program pelaksanaan program BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, yang tergabung sejak awal pendirian BUMDes, serta aktif dalam pelaksanaan program BUMDes
3. Anggota BUMDes yang aktif dalam segala kegiatan Pemberdayaan BUMDes
4. Anggota BUMDes yang mengikuti program minimal 2 tahun
5. Anggota BUMDes yang sudah memiliki usaha dan berjalan

Berdasarkan kriteria tersebut, yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari, aparat desa berjumlah 2 orang, yaitu kepala desa dan penasehat desa. pengurus BUMDes berjumlah 3 orang yaitu ketua, bendahara dan pembina, dan 5 orang masyarakat yang menjadi anggota BUMDes, sehingga yang menjadi total keseluruhan sampel berjumlah 10 orang.

- 2) Metode pengumpulan data

²⁴ Ibid.h. 301

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode Interview (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas topik tertentu. Metode interview mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dengan seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan dengan orang tersebut.²⁵

Penulis menggunakan teknik interview dengan jenis interview bebas terpimpin yang merupakan kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara menggunakan pedoman yang merupakan garis besar terkait hal-hal yang akan ditanyakan. Selanjutnya, cara bagaimana pertanyaannya itu diajukan dan teknis wawancara diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara.²⁶

Teknik ini digunakan karena penulis mengharapkan data yang dibutuhkan akan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak akan diragukan lagi. Penulis mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang bisa diteliti dan juga yang diinterview tidak merasa lelah diambil datanya.

Teknik ini digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Adapun data - data yang penulis tanyakan adalah tentang bagaimana cara yang digunakan pengurus dalam memberdayakan anggota Badan Usaha Milik desa, serta pengalaman anggota

²⁵ .Koetjraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* ,(Jakarta :PT. Gramedia Pustaka), h.22

²⁶ .Kartini Kartono, *Pengembangan Metodologi Reseach* Cet. II, (Bandung : Masdar maju,1996), h.128

BUMDes sebelum dan sesudah diberikan pelatihan oleh pihak BUMDes, dan usaha –usaha apa yang di kelola oleh pihak BUMDes.

Tehnik interview ada timbal balik antar peneliti dengan responden sehingga informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

b. Teknik Observasi

Secara luas opservasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran akan tetapi, opservasi disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.²⁷

Adapun observasi yang digunakan adalah observasi non partisipasi, yaitu peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diamati. Metode ini penulis gunakan untuk menunjang dan melengkapi data-data. Adapun data yang digali adalah data aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pembina, pengurus dan pengelola, serta seluruh anggota BUMDes, saat penulis melakukan wawancara dan kunjungan, khususnya terkait masalah Pemberdayaan melalui Badan Usaha Milik desa, sehingga diharapkan hasil yang didapatkan adalah objektif.

c. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporn dan surat-surat resmi.²⁸ Data yang didapatkan bersumber dari dokumen tertulis yang resmi sesuai dengan keperluan penelitian agar data yang didapatkan valid, kongkrit dan obyektif.

²⁷ .Irawan Soeharto *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : PT. Remaja Rosadakarya, 2008), h.69

²⁸ .Husaini Usman dan Purnomo Setiadi akbar. *Metode Penelitian sosial*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h.73

Kegiatan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data pendukung dalam melengkapi data-data terkait masalah penelitian yang penulis lakukan.

Metode dokumentasi diharapkan untuk mencari hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat maupun agenda. Metode ini merupakan metode pembantu dalam rangka perlengkapan data-data yang dibutuhkan, terutama untuk menginventarisir, mengagendakan serta menelaah data-data yang sudah ada.²⁹

Karena itu penulis menggunakan dokumen-dokumen dari pihak Badan Usaha Milik Desa termasuk didalamnya struktur kepengurusan dan data pelatihan dan sarana dan prasarana, agenda atau jadwal kegiatan dan lain-lain.

1. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisis data adalah bagi mana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.³⁰ Karena penelitian yang penulis bahas sifatnya deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.³¹ Dalam penelitian ini analisis data yang penulis gunakan bersifat deduktif yaitu secara makro-mikro dengan mengurutkan masalah atau situasi

²⁹ *Ibid*, h. 71

³⁰ *Ibid*, hal. 280

³¹ .Irawan Soeharto, *Op. Cit*, h. 35

sosial dari yang umum lalu dikerucutkan ke yang lebih kecil agar mudah dilihat akar permasalahannya seperti apa.

Model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1) Tahap Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, membuat kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.³² Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data lapangan yang dilakukan secara *continue* yang diorientasikan secara kualitatif. Penulis melakukan pemilihan dan menelaah secara dalam keseluruhan data yang dihimpun lapangan mengenai pemberdayaan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2) Tahap Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian ini yaitu Pemberdayaan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan penulis dapat mengklarifikasi topik masalah, mengkode, menyajikan data sesuai dengan data lapangan dan teori yang penulis gunakan.

3) Tahap Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yang terpenting dalam penelitian ini adalah Verifikasi data/ Penarikan Kesimpulan. Verifikasi data penelitian yaitu menarik

³². Irawan Soeharto, *Op. Cit*, h. 37

simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, penelitian melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpul yang dapat dipercaya.³³

4) Keabsahan Data

Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengecek data dan informasi yang telah di peroleh dengan alat dan waktu yang berbeda. Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi yang di peroleh melalui wawancara dengan informan , kemudian data tersebut di tanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain. Dalam hal ini penulis mengambil informasi dari pengurus BUMDes kemudian membandingkan dengan anggota bumdes sehingga data yang di peroleh sama. Keuntungan menggunakan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validasi, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau

³³ *Ibid*, h. 131

menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, tehnik yang digunakan hanya terbatas pada tehnik pengamatan lapangan dan triangulasi.³⁴



³⁴ *Ibid*, h. 332

BAB II

PROSES PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN BUMDES SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT

A. Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.¹

Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah :

1. Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
2. Tahap pengkapasitasan (capacity building), atau memampukan (enabling), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan, ketrampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
3. Tahap pendayaan (empowerment), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan

¹ . 3Toto Mardikanto, Poerwono Soeboto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 61

yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.²

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan kebergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.³

2. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Menurut Jim Iffe, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuatan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

- a. Pilihan personal dan kesempatan hidup : keputusan dalam membuat keputusan gaya hidup dan pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan ; kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat.
- e. Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informasi dan kemasyarakatan.

² . Ayub M. Padangaran, Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat, (Kendari : Unhalu Press, 2011), h. 31

³ . Ibid, h. 62

- f. Aktifitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran baran dan jasa.
- g. Reproduksi : kemampuan dalam kaitanya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisai.⁴

Tahap-tahap pemberdayaan masyarakat berdasarkan pendapat pendapat ptoses belajar dalam pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahapan-tahapan yang harus d lalui meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan penikatan kapasitas sendiri. Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif . sentuhan penyadaran nakan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat berlangsung kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk masadepan yang lebih baik.
2. Tahap trasformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan , kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan ketrampilan yang memiliki relvansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan akan mestimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapanketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembanunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

⁴.Edi Suharto, *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafi Aditama, 20 10,) h.59.

3. Tahap pengayaan/ peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengartikan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan atau peran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.⁵

Hogan menggambarkan pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari empat tahap utama yaitu:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan.
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidak berdayaan
- c. Mengidentifikasi proyek dan mengidentifikasi basis daya yang bermakna
- d. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplentasikan.⁶

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khusus kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya di tinds oleh struktur sosial yang tidak adil).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membantu pembangunan dari masyarakat lemah, renta, miskin, marjinal dan kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan.⁷ Memberdayakan kelompok tersebut secara sosial ekonomi sehinga

⁵ . Sulistiyani, A. T, *Kemitraan dan model-model pemberdayaan masyarakat*. (Yogyakarta: Gava Media,2009), h.83.

⁶ . Ismandi Rukminto Adi, *intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 85.

⁷ . sulistiyani, *Op.Cit*, h. 79.

mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Sulistiyani mengatakan tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.⁸ Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk meimikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dengan pengarahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencapai solusi atau permasalahan yang dihadapi. Kondisi kognitif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang diarahkan pada perilaku positif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktifitas pembangunan.

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dalam memenuhi kebutuhannya, dalam melakukan segala aktivitas, pada umumnya masyarakat dihadapkan pada tiga masalah pokok perekonomian yaitu barang apa yang

⁸ . *Ibid*, h. 80

diproduksi, bagaimana cara memproduksinya dan untuk siapa barang tersebut diproduksi.

Untuk itulah kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat dikelompokkan dalam tiga kegiatan utama yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi.⁹ Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya, artinya upaya mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi rakyat sehingga memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.¹⁰ Perubahan struktur ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi moderen, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang lebih tangguh.

Pemberdayaan ekonomi adalah bentuk intervensi (mempengaruhi) masyarakat yang digunakan untuk mengandalkan perubahan-perubahan pada tingkat kesejahteraan di bidang ekonomi dengan berbagai cara dan pertimbangan yang disesuaikan dengan kemampuan kelompok yang bersangkutan seperti kondisi sumber daya alam yang tersedia dan kemampuan sumber daya manusianya.

Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.¹¹

⁹ . Bintara. A, *Ringkasan Ekonomi*, (Badung : Ganecca Exacta, 1985), h.6.

¹⁰.Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, (Jakarta : Pustaka Utama, 1999), h. 67-68

¹¹.Onny S. Prijono dan A.M.W. Panaka, *Mengenai Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), h.48.

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan kedilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan.¹²

Menurut Pain sebagai mana yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya, ditunjukan guna membantu kilien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.¹³

Konsep pemberayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselegarakan oleh rakyat yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekoomi yang kuat, besar, moderen, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Prubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi moderen, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsiten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktifitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai setimulan, tetapi harus dijamin adanya

¹² .Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), h.3.

¹³.Isbandi Rukminto Adi

- kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wira usaha baru, dan pemerataan spasial
 - f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM, dan peningkatan akses kesarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.¹⁴

4. Strategi Dan Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam pembangunan atau pemberdayaan ekonomi di wilayah perkotaan dan pedesaan, terdapat empat strategi pemberdayaan ekonomi yaitu :

1) Strategi Pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktifitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat.

2) Strategi kesejahteraan

Strategi kesejahteraan bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar dan nasional. Seperti perbaikan pemukiman penduduk, dan pembangunan fasilitas transportasi.

3) Strategi Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-

¹⁴ .Onny. S. Prijono, *Op.Cit*, h.52.

kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri mungkin saja dengan bantuan pihak luar untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan sumberdaya yang dibutuhkan wilayah pedesaan dan perkotaan.

4) Strategi Terpadu Dan Menyeluruh

Strategi terpadu dan menyeluruh tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat. Sasaran strategi ini adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah.¹⁵

Menurut Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syaefi salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa ini adalah tingkat kesenjangan ekonomi yang terlampau lebar tingkat kemiskinan yang terlampau menakutkan.

Dengan demikian gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya kesejahteraan rakyat. Maka pilihan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat hendaknya dilaksanakan dalam beberapa langkah strategis berikut:

- 1) Pemberian akses yang lebih besar kepada aset produksi yaitu sumber dana yang melimpah upaya penguatan modal usaha.
- 2) Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat dengan membangun kebersamaan dan kesetiakawanan agar timbul rasa percaya diri dan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi
- 3) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia yang kuat dan tangguh.
- 4) Kebijakan ketenaga kerjaan yang mendorong tenaga kerja yang trampil, menguasai ketrampilan dan keahlian hidup, serta tenaga kerja mandiri dengan bekal keahlian wirausaha.

¹⁵ .Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Grha Ilmu 2006), h.21-22

5) Pemerataan pembangunan antar daerah agar rakyat mudah mengakses bantuan modal usaha dan banyaknya pelatihan ketenaga kerjaan. Dengan demikian, inti pembangunan ekonomi kerakyatan tidak lain adalah mensejahterakan masyarakat dalam dimensi lahir dan batin.¹⁶

Jim Ife mengungkapkan ada 22 prinsip pembangunan masyarakat (ekonomi dan sosial) yaitu itu pembangunan terpadu dan seimbang, konfrontasi terhadap petimpangan struktural, menjunjung tinggi hak-hak manusia, keberlanjutan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan, kemandirian, pembangunan personal dan politik, kepemilikan komunitas independen dari negara, tujuan dekat (antara) dan visi akhir jangka panjang, pembangunan orhanis, tahapan pembangunan, bebas dari tekanan luar, proses dan hasil, integritas proses, anti kekerasan, inklusif, konsensus, keoprasi dan mendefinisikan kebutuhan¹⁷

B. Lembaga Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Lembaga Ekonomi

Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang berperan dalam bidang perekonomian, lembaga ini berfungsi untuk menjaga kebutuhan masyarakat supaya dapat terpenuhi dan berkelanjutan.

Lembaga ekonomi ialah pranata yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Perdagangan mulai lahir ketika orang mulai menginginkan hasil produksi orang lain. Lambat laun proses pertukaran memilih standar tertentu, diatur, dan diperkirakan sehingga dianggap perlu dikembangkan. Lembaga ekonomi lahir pada saat orang mulai melakukan barter secara rutin, membagi-bagi tugas, dan mengakui adanya tuntutan seseorang terhadap orang lain. Atas dasar tersebut pula, suatu lembaga ekonomi tidak dapat terlepas dari tiga pokok

¹⁶ .Nanih MahendraWati dan Agus Ahmad Syafei, *Pembangunan Masyarakat Islam*, (Bandung: Raja Rosada Karya, 2001), h.70-71

¹⁷ .Suparjan Hempri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: AdtyaMedia, 2003), h.36-42.

dalam bidang ekonomi yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Fungsi lembaga ekonomi secara umum adalah untuk mengatur hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin sehingga orang dapat memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan fasilitas penting dalam konteks pembangunan ekonomi. Dalam rangkaian kegiatannya, Fasilitas ini mengarah kepada pembuatan aturan main lembaga ekonomi masyarakat, formalisasi lembaga ekonomi masyarakat, pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas manajemen dan teknis kepada masyarakat maupun kepada lembaga ekonomi masyarakat, pembentukan jaringan kerja dengan lembaga ekonomi lain, pemanfaatan akses sumber daya ekonomi dalam rangka kemitraan, dan pembukaan akses terhadap pengambilan kebijakan.

Salah satu upaya yang kini dapat di tempuh oleh lembaga/ organisasi adalah menciptakan peluang usaha dan mendorong tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Kegiatan kewirausahaan ini memiliki potensi yang besar, karena mampu membangun perekonomian masyarakat yang mandiri, mampu menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya diharapkan akan mampu menciptakan kesejahteraan hidup dan pemerataan pembangunan perekonomian secara merata. Sebenarnya upaya pengembangan kewirausahaan ini sudah digaungkan dalam GBHN 1993, pada angka 8, butir f, yang menyebutkan bahwa “pembinaan ekonomi rakyat diutamakan pada pengembangan kewirausahaan, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan dan pelatihan, pembiayaan dan penyuluhan, serta permodalan.”. Kebijakan yang menekankan pentingnya pengembangan kewirausahaan didasarkan pada kepedulian dan pengakuan tinggi, dan pemerintah juga yakin bahwa pembangunan dan pemberdayaan kegiatan ekonomi

¹⁸. Horton dan Hunt diterjemah oleh Aminudin Ram, *Sosiologi* (Jakarta:1999), h. 372

masyarakat sangat potensial dikembangkan untuk menopang perekonomian nasional.¹⁹

Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat, Musa Asy'arie mengatakan bahwa “Instusi – instusi keagamaan perlu mendorong, dan kalau mungkin memberikan kesempatan kepada pemeluknya, supaya berlatih dan mempersiapkan diriya untuk memilih peluang menjadi wirausahawan”.²⁰

Cabang ekonomi adalah lembaga-lembaga yang berkisar pada lapangan produksi, distribusi, konsumsi (pemakaian) barang-barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Setiap masyarakat akan menyusun pola pemenuhan kebutuhan ekonominya yang disebut konsumsi atau pengeluaran pendapatannya berupa makanan, pakaian, perumahan yang harus tersedia agar mereka dapat bertahan hidup. Setiap pemenuhan kebutuhan tidak selamanya dapat dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri, adakalanya memerlukan kelompok masyarakat lain.²¹

2. Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi

Secara umum, yang hendak dicapai lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat. Pada prinsipnya, fungsi lembaga ekonomi ntralain sebagai berikut.

- a. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan.
- b. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran/barter
- c. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang.
- d. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja.
- e. Memberi pedoman tentang cara pengupahan.
- f. Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja
- g. Meberi identitas diri bagi masyarakat.

¹⁹. Muhammad Ramadhan, *Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan*, (Yogyakarta, LKIS: 2018), h. 97

²⁰.Musa Asy'ari, *Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta : Lesfi, 1997), h.141

²¹. Bagja Waluya *Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 44

3. Struktur lembaga ekonomi

secara sederhana, lembaga ekonomi dapat diklarifikasi sebagai berikut:

- a. Sektor agraris meliputi kegiatan pertanian, seperti sawah, perdagangan, perikanan, dan peternakan. Sektor agraris pada dasarnya dapat digolongkan melalui tahap – tahap dari yang sederhana, transisi, dan moderen sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Sektor industri ditandai dengan kegiatan produksi barang . sektor ini membutuhkan lembaga ekonomi yang semakin kompleks bagaikan bagian- bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sistem sehingga tatanan ekonomi berkembang, seperti cara rekrutmen atau pengambilan tenaga kerja, cara pengupahan produksi massal, efektifitas, secara efisien kerja dan pengolahannya.
- c. Sektor perdagangan merupakan aktifitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen.²²

C. Dasar Kebijakan Pemerintah Tentang BUMDes

1. Kedudukan BUMDes

Desa memiliki berbagai potensi baik itu kekayaan sumber daya alam, adat istiadat masyarakat, dan sumber daya manusia yang harus dimobilisasi oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

²². Kun Maryati dan Juju Suryawati *Sosiologi* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007)H.81

²³ . UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Definisi BUMDes menurut Maryunani, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.²⁴

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.²⁵ BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.²⁶

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh

²⁴. Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 35 58 Ibid, h. 36

²⁵.Ibid, h. 36

²⁶. Sutoro Eko, dkk. 2015. *Modul Pelatihan Pratusas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.²⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri diatas, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Keberadaan BUMDes di era otonomi daerah pada awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.²⁸

D. Fungsi dan tujuan BUMDes

Tujuan pembentukan BUMDes yaitu:

- a. Menghindarkan anggota masyarakat Desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- b. Meningkatkan peranan masyarakat Desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- c. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan.
- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat Desa.
- e. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di Desa.

²⁷. Ibid. h. 4

²⁸.Purnomo. 2004. Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.h. 17-18

- f. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah.²⁹

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikan. ³⁰

E. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berikut langkah-langkah pelebagaan BUMDes secara partisipatif yang bertujuan agar agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa

- a. Sosialisasi tentang BUMDes, inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan, Pendamping Teknis yang berkedudukan di Kabupaten maupun Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa, secara praktikal Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Salah satu tahapan dalam Musyawarah Desa yang penting adalah Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUMDes oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para Pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yakni:
 - 1) Menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.

²⁹. Muhammad Yasin, dkk., Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa., hal. 410

³⁰. Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa

- 2) Mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.
 - 3) Merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT atau LKM) maupun tidak berbadan hukum.
 - 4) Klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUMDes dengan tipe pelayanan (serving) atau bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting). Kedua tipe unit usaha BUMDes ini relatif minim laba namun minim resiko kerugian bagi BUMDes.
 - 5) Organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus).
 - 6) Modal usaha BUMDes. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
 - 7) Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDes.
 - 8) Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDes
- c. Penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDes (lampiran:AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes).³¹

³¹ . Anom Surya Putra, Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa., hal. 28-35

F. BUMDes Sebagai Lembaga Pemberdayaan

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi Desa melalui pengelolaan keuangan Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam melakukan berbagai inovasi pembangunan

Pendampingan terhadap masyarakat Desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.³²

Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan professional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan.

³² . Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Maka strategi pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa antara lain.³³

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa. Artinya sebagai alternatif masyarakat khususnya yang kurang mampu untuk berwira usaha agar menjadi mandiri.
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.



³³ . Purnomo. 2004. Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.h. 17-18

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* Bandung: Alfabeta, 2007
- Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan
- Bintara. A, *Ringkasan Ekonomi*, Badung : Ganecca Exacta, 1985
- Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*, Bandung: Rafi Aditama, 2010,
- Edi Sueharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* : Jurnal Comdev, Jakarta: BEMJ,PMI, 2004
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi akbar.*Metode Penelitian sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2001
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Jakarta : Pustaka Utama, 1999
- Henry Faisal, *Ekonomi Media*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010
- H. A.W. Widjaya, *Otonomi Desa* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2009)
- Irawan Soeharto *Metode Penelitian Sosial* Bandung : PT. Remaja Rosadakarya, 2008
- Ismandi Rukminto Adi, *intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka),

Kartini Kartono, *Pengembangan Metodologi Reseach* Cet. II, Bandung : Masdar maju,1996

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013

Nanih MahendraWati dan Agus Ahmad Syafei, *Pembangunan Masyarakat Islam*, (Bandung: Raja Rosada Karya, 2001

Noor Juliansyah dan Ahmadi, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana, 2013

Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008

Onny S. Prijono dan A.M.W. Panaka, *Mengenai Pemberdsyaan :Konsep, Kebijakan dan implemtasi*, Jakarta: CSIS , 1996

Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa*, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.

Raharjo Adisasmata, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Grha Ilmu 2006

Suparjan Hempri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Adtya Media, 2003

Sedarmayanti, Hidayat Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, Bandung, Alfabeta CV, 2013

Sulistiyani, A. T, *Kemitraan dan model-model pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media,2009

Sutoro Eko, dkk. 2015. Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011

Wahjudin Sumpeno, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Aceh: The World Bank, 2011



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, *Menajemen Pemberdayaan Perempuan* Bandung: Alfabeta, 2007
- Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan
- Bintara. A, *Ringkasan Ekonomi* , Bandung : Ganecca Exacta, 1985
- Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*, Bandung: Rafi Aditama, 2010,
- Edi Sueharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* : Jurnal Comdev, Jakarta: BEMJ,PMI, 2004
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi akbar.*Metode Penelitian sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2001
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Jakarta : Pustaka Utama, 1999
- Henry Faisal, *Ekonomi Media*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010
- H. A.W. Widjaya, *Otonomi Desa* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2009)
- Irawan Soeharto *Metode Penelitian Sosial* Bandung : PT. Remaja Rosadakarya, 2008
- Ismandi Rukminto Adi, *intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* ,(Jakarta :PT. Gramedia Pustaka),
- Kartini Kartono, *Pengembangan Metodologi Research* Cet. II, Bandung : Masdar maju,1996

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Nanih MahendraWati dan Agus Ahmad Syafei, *Pembangunan Masyarakat Islam*, (Bandung: Raja Rosada Karya, 2001
- Noor Juliansyah dan Ahmadi, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana, 2013
- Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008
- Onny S. Prijono dan A.M.W. Panaka, *Mengenai Pemberdsyaan :Konsep, Kebijakan dan implementasi*, Jakarta: CSIS , 1996
- Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa*, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.
- Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Grha Ilmu 2006
- Suparjan Hempri Suyatno, *Pembangunan Masyrakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: AdtyaMedia, 2003
- Sedarmayanti, Hidayat Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, Bandung, Alfabeta CV, 2013
- Sulistlyani, A. T, *Kemitraan dan model-model pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media,2009
- Sutoro Eko, dkk. 2015. *Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011

Wahjudin Sumpeno, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Aceh: The World Bank, 2011

